

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Surat kabar merupakan salah satu jenis media massa dalam proses komunikasi. Surat kabar memberikan informasi dan membantu masyarakat untuk mengawasi dunia dengan menyediakan berita. Surat kabar tidak hanya mengelola informasi melalui berita, tetapi juga aspek-aspek yang lainnya. Karena itu fungsi surat kabar meliputi berbagai aspek seperti menyiarkan informasi, sebagai sarana pendidikan massa (*mass education*), menghibur dan fungsi mempengaruhi yang memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat.

Pada umumnya isi surat kabar terdiri dari berita, baik berita yang terletak dihalaman depan maupun berita biasa, rubrik opini, reportase, wawancara, feature, iklan dan aneka ragam hiburan seperti cerita bersambung, cerita pendek, cerita bergambar, teka-teki silang dan lain. Semua komponen itu diramu sedemikian rupa agar pembaca tertarik membaca dan menjadi pelanggan surat kabar.

Surat kabar lebih berkompromi dengan halaman, sehingga pemberitaannya lebih “dalam” dibandingkan dengan media lainnya. Proses konstruksi realitas yang dilakukan surat kabar merupakan usaha “menceritakan” sebuah peristiwa atau keadaan. Realitas tersebut tidak serta merta melahirkan berita, melainkan melalui proses interaksi antara penulis berita (wartawan) dengan fakta suatu peristiwa. Hanya peristiwa yang mempunyai *news value* dan menarik perhatian publik yang akan menjadi fokus utama berita.

Berita merupakan laporan tentang suatu peristiwa atau kejadian. Berita merupakan informasi yang dapat dikatakan akurat. Berita menyajikan fakta-fakta pada sebuah peristiwa atau pengalaman yang terjadi, baik yang dialami secara individual maupun lembaga. Terkadang masyarakat menjadikan berita sebagai alat mencari kebenaran terhadap suatu peristiwa atau informasi yang simpang siur.

Berita merupakan aspek paling utama yang menjadi dasar pertimbangan redaksi untuk menempatkan peristiwa dihalaman pertama atau *hedaline* surat kabar. Tidak semua orang memiliki waktu luang untuk membaca surat kabar, maka pemberian dalam surat kabar dibuat dengan cara menyampaikan dan memuat informasi atau fakta yang terlibat dalam peristiwa tersebut apa adanya secara langsung, baik yang menjadi pokok masalah maupun apa yang dikatakan tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Sehingga, beberapa peristiwa sering diangkat menjadi *headline* atau berita utama dalam surat kabar.

Salah satu contoh berita yang sempat menarik perhatian publik dan diangkat menjadi *headline* ialah berita banjir di Bandung Selatan. Semua media baik nasional maupun lokal, baik media cetak maupun elektronik secara bergantian mengulas berita seputar banjir yang terjadi di Bandung Selatan. Para awak media pun, berlomba-lomba membuat berita, baik dari segi jumlah kerugian yang diakibatkan karena banjir, korban banjir yang mengungsi, status banjir, pengalokasian bantuan, sikap dari pemerintah menangani bencana banjir tersebut. Dalam beberapa edisi di surat kabar lokal maupun nasional, pemberitaan banjir Bandung Selatan selalu hadir menyapa pembaca dihalaman pertama atau *hedaline*.

Berdasarkan dokumentasi liputan berita yang dilakukan, 22 tahun lalu pakar lingkungan sudah mengingatkan bahwa Bandung Selatan akan terkena banjir besar bersiklus 20 atau 25 tahunan. Prediksi itu disampaikan Maret 1986, ketika Bandung Selatan dilanda banjir besar (jauh lebih parah dibandingkan dengan sekarang) yang "menenggelamkan" 10 desa di 10 kecamatan. Tujuh kecamatan diantaranya Baleendah, Buahbatu, Dayeuhkolot, Majalaya, Rancaekek, Banjaran, dan Pameungpeuk, terkena banjir paling parah. Sebanyak 68.635 jiwa menderita dan 38.672 mengungsi, terdapat 5 korban tewas.

Berdasarkan penelusuran berita yang dilakukan dari epaper Harian Umum *Pikiran Rakyat*, pada tahun 2004 terjadi dua kali banjir di Bandung Selatan. Disusul tahun 2010, banjir besar kembali terjadi di Bandung Selatan menggenangi Kecamatan Dayeuhkolot, Bojongsoang, dan Baleendah. Warga korban banjir dari ketiga kecamatan tersebut berjumlah 56.000 jiwa, 6.000 jiwa yang mengungsi. Akhir tahun 2012, banjir kembali merendam 6 kecamatan yaitu Kecamatan Baleendah, Dayeuhkolot, Bojongsoang, Rancaekek, Cileunyi dan Banjaran. Banjir yang terjadi dari 21-24 Desember 2012, diakibatkan karena meluapnya hulu Sungai Citarum. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merilis 13.469 unit rumah terendam, korban mencapai 57.803 jiwa dan pengungsi 1.448 jiwa.

Pada tahun 2013, terjadi pada bulan Februari, Maret dan April.

Berdasarkan Harian Umum *Pikiran Rakyat* edisi 23 Desember 2014, isi beritanya:

Kepala Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung, Marlan mengungkapkan, banjir diakhir tahun 2014 merupakan banjir terbesar dan terparah dalam empat tahun terakhir. Banjir besar sebelumnya pernah terjadi tahun 2010. Hujan deras yang mengguyur bagian hulu menyebabkan Sungai Citarum meluap dan menggenangi delapan kecamatan di Bandung Selatan.

Berdasarkan pemberitaan di Harian Umum *Pikiran Rakyat* edisi 24 Desember 2014 yang isinya beritanya:

Banjir kembali merendam 6 kecamatan di Kabupaten Bandung diantaranya Dayehkolot, Bojongsoang, Baleendah, Majalaya, Kamasan, dan Rancaekek. Banjir hampir satu pekan lebih itu merendam 36.000 rumah di tiga kecamatan, yakni Dayehkolot, Bojongsoang, dan Baleendah. Warga korban banjir dari ketiga kecamatan tersebut berjumlah 27.000 jiwa, sekitar 16.000 jiwa mengungsi di 30 titik pengungsian. Banjir di kawasan tersebut telah melumpuhkan 95% aktivitas ekonomi warga.

Peristiwa banjir yang melanda Bandung Selatan telah menarik perhatian media lokal maupun nasional, baik media cetak maupun elektronik untuk melaporkan peristiwa banjir tersebut. Para awak media berlomba-lomba membuat laporan tercepat dari peristiwa banjir secara faktual, penting, dan menarik bagi sebagian khalayak, serta menyangkut kepentingan mereka sehingga menarik minat khalayak yang membacanya.

Harian Umum *Pikiran Rakyat*, menjadi media massa lokal yang memberitakan peristiwa banjir. Berita banjir Bandung Selatan secara terus menerus dibahas oleh Harian Umum *Pikiran Rakyat* terhitung dari 20 Desember 2014 – 15 Februari 2015. Beberapa berita ditaruh di halaman depan (*hedaline*) surat kabar dengan tambahan foto yang besar. Sebagai surat kabar daerah, Harian Umum *Pikiran Rakyat* tentunya memainkan peran penting dalam memberitakan fenomena atau peristiwa yang terjadi di daerahnya. Sehingga menjadikan peristiwa banjir Bandung Selatan sebagai agenda media bagi agenda khalayaknya sendiri.

Para awak medianya pun selalu berupaya memberikan yang terbaik dan menjadikan yang terbaik sehingga masyarakat tidak ketinggalan informasi seputar bencana banjir Bandung Selatan. Selama hampir satu pekan lebih, pemberitaan di

Harian Umum *Pikiran Rakyat* secara berulang-ulang dan fokus pada satu topik permasalahan yaitu banjir Bandung Selatan. Para awak media melihat bahwa banjir di Bandung Selatan selalu terjadi setiap tahunnya, bahkan banjir semakin meluas tanpa adanya solusi jitu. Sungai Citarum yang digadang-gadang menjadi penyebab banjir sudah dikeruk, namun tetap saja banjir di kawasan belum teratasi.

Pemberitaan banjir Bandung Selatan di media massa (dalam hal ini Harian Umum *Pikiran Rakyat*), tidak menutup kemungkinan akan merubah opini para pemangku kebijakan di tanah air sehingga opini tersebut dapat berkembang menjadi sebuah fakta yang perlu ditangani secara serius. Media dalam cara tertentu akan berinteraksi dengan pikiran publik yang menghasilkan agenda publik. Namun agenda media juga turut hadir berinteraksi dengan agenda kebijakan. Berita banjir Bandung Selatan yang semakin terekspose oleh media membuat perhatian para pemangku kebijakan tertuju pada pemberitaan tersebut.

Berdasarkan pemberitaan di Harian Umum *Pikiran Rakyat* edisi 22 Desember 2014 yang isi beritanya:

Presiden Republik Indonesia, Jokowi Widodo memberikan perintah kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi untuk memantau langsung keadaan banjir di Bandung Selatan. Yuddy merasa prihatin atas bencana banjir yang selalu terjadi di Bandung Selatan. Yuddy juga mempertanyakan program pengerukan sungai Citarum yang kurang berjalan maksimal. Ia mengungkapkan bahwa presiden memberikan arahan agar segera diadakan rapat koordinasi dengan kementerian dan instansi terkait agar bisa menyelesaikan masalah banjir tersebut. Menurut Yuddy harus adanya rencana yang jelas soal penanggulangan banjir.

Pemerintah pusat (Presiden RI, Joko Widodo) meminta penanganan banjir di Bandung Selatan dilakukan secara bertahap agar banjir tidak terulang lagi. Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan mengungkapkan, peta jalan penanganan masalah banjir di Bandung Selatan sudah dibuat pada 2010. Sekarang dimunculkan lagi, akan segera diperbaiki sehingga road map bisa disepekat oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan pemberitaan Harian Umum *Pikiran Rakyat* edisi 26 Desember 2014 yang isi beritanya:

Ketua DPRD Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari juga mendukung upaya yang dilakukan Pemprov menyusun peta jalan penanganan banjir di Bandung Selatan. Menurut Ineu, penanganan banjir Bandung Selatan itu harus dievaluasi sebab terulang terus, padahal penanganannya dilakukan setiap tahun.

Berbagai pemberitaan seputar banjir Bandung Selatan memberikan warna tersendiri. Salah satu berita yang menggiring opini masyarakat dan kemungkinan mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam penanggulangan banjir. Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana lahir dengan tujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Namun setelah diimplementasikan hampir kurang lebih delapan tahun, masyarakat khususnya korban bencana banjir belum merasakan manfaatnya dalam memberikan perlindungan yang cepat dan tepat bagi mereka berikut dampak yang muncul akibat bencana banjir.

Peranan media massa (Harian Umum *Pikiran Rakyat*) yang secara terus menerus memberitakan banjir, setidaknya mendorong pemerintah pusat turun langsung menangani permasalahan banjir di Bandung Selatan. Kecenderungan adanya perubahan kebijakan pemerintah menagai banjir bisa saja disebabkan oleh berita yang berkembang di masyarakat. Pemerintah belajar seberapa besar arti penting diberikan pada suatu topik dari cara media massa memberikan penekanan terhadap topik tersebut.

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti memandang penting meneliti berita banjir karena salah satu berita yang mendapat tempat bagi khalayak adalah berita mengenai bencana alam. Topik ini menjadi sangat penting karena menyangkut tentang keberlangsungan hidup manusia, sehingga tidak heran berita banjir memiliki daya rangsang tinggi bagi khalayak.

Peneliti mengambil tayangan berita banjir, karena saat ingin membuat penelitian, berita ini sedang muncul diberbagai media massa lokal maupun nasional. Alasan memilih Harian Umum *Pikiran Rakyat*, karena setelah mengasrikan berita mengenai banjir, Harian Umum *Pikiran Rakyat* cenderung lebih sering menampilkan berita banjir Bandung Selatan. Beberapa berita ditaruh dihalaman pertama surat kabar dengan tambahan foto. Harian Umum *Pikiran Rakyat*, sebagai surat kabar orang Bandung tentunya memainkan peran penting dalam menginformasikan fenomena atau peristiwa yang terjadi dikawasannya.

Peneliti ingin mengetahui kebijakan atau langkah yang akan dilakukan pemerintah dalam penanggulangan banjir di Bandung Selatan. Terlebih solusi normalisasi Sungai Citarum yang memakan biaya triliyunan berjalan tidak maksimal, sehingga banjir tetap saja menerjang kawasan Bandung Selatan. Pemerintah pusat meminta untuk menyelesaikan permasalahan banjir di Bandung Selatan secara bertahap, setidaknya mendorong pemerintah provinsi Jawa Barat untuk bertindak dalam menyelesaikan permasalahan banjir.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di latar belakang, rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana hubungan antara berita banjir Bandung Selatan di Harian Umum *Pikiran Rakyat* dengan kecenderungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengubah kebijakan penanggulangan banjir. Identifikasi masalah penelitian ini diantaranya:

1. Adakah hubungan antara (*visibility*) berita banjir Bandung Selatan di Harian Umum *Pikiran Rakyat* dengan kecenderungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengubah kebijakan penanggulangan banjir?
2. Adakah hubungan antara (*audience salience*) berita banjir Bandung Selatan di Harian Umum *Pikiran Rakyat* dengan kecenderungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengubah kebijakan penanggulangan banjir?
3. Adakah hubungan antara (*valence*) berita banjir Bandung Selatan di Harian Umum *Pikiran Rakyat* dengan kecenderungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengubah kebijakan penanggulangan banjir?
4. Adakah hubungan antara berita banjir Bandung Selatan di Harian Umum *Pikiran Rakyat* dengan dukungan (*support*) Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengubah kebijakan penanggulangan banjir?
5. Adakah hubungan antara berita banjir Bandung Selatan di Harian Umum *Pikiran Rakyat* dengan kemungkinan kegiatan (*likelihood of action*) Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengubah kebijakan penanggulangan banjir?
6. Adakah hubungan antara berita banjir Bandung Selatan di Harian Umum *Pikiran Rakyat* dengan kebebasan bertindak (*freedom of action*) Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengubah kebijakan penanggulangan banjir?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud mencari informasi faktual dari pemangku kebijakan yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai bagaimana hubungan berita banjir Bandung Selatan di Harian Umum *Pikiran Rakyat* dapat mengubah kebijakan penanggulangan banjir. Tujuan penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Mengetahui adanya hubungan antara (*visibility*) berita banjir Bandung Selatan di Harian Umum *Pikiran Rakyat* dengan kecenderungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengubah kebijakan penanggulangan banjir.
2. Mengetahui adanya hubungan antara (*audience salience*) berita banjir Bandung Selatan di Harian Umum *Pikiran Rakyat* dengan kecenderungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengubah kebijakan penanggulangan banjir.
3. Mengetahui adanya hubungan antara (*valense*) berita banjir Bandung Selatan di Harian Umum *Pikiran Rakyat* dengan kecenderungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengubah kebijakan penanggulangan banjir.
4. Mengetahui adanya hubungan antara berita banjir Bandung Selatan di Harian Umum *Pikiran Rakyat* dengan dukungan (*support*) Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengubah kebijakan penanggulangan banjir.
5. Mengetahui adanya hubungan antara berita banjir Bandung Selatan di Harian Umum *Pikiran Rakyat* dengan kemungkinan kegiatan (*likelihood of action*) Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengubah kebijakan penanggulangan banjir.
6. Mengetahui adanya hubungan antara berita banjir Bandung Selatan di Harian Umum *Pikiran Rakyat* dengan kebebasan bertindak (*freedom of action*) Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengubah kebijakan penanggulangan banjir.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang faktual, serta dapat menganalisis hasil hubungan antara berita banjir Bandung Selatan di Harian Umum *Pikiran Rakyat* dengan kecenderungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengubah kebijakan penanggulangan banjir.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih mendalam terkait kebijakan dalam menanggulangi bencana banjir. Informasi dan pengetahuan yang akan digali melalui penelitian ini menjadi masukan dan menambah referensi dalam bidang ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian komunikasi massa, efek pemberitaan surat kabar dan kebijakan pemerintah.

2. Secara Praktis

Pada tataran praktis, penelitian diharapkan memberi masukan positif bagi para pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka mengubah kebijakan penanggulangan banjir, sehingga permasalahan banjir di Bandung Selatan bisa diatasi secara bertahap.

Pengelola penerbitan pers, khususnya Harian Umum *Pikiran Rakyat* diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemberitaan mengenai isu-isu lingkungan seperti berita banjir. Bagi para praktisi yang menggeluti media massa terutama mengenai pemberitaan di surat kabar serta efek yang timbulkan dalam memberikan informasi.

E. Kajian Pustaka

Ada keterkaitan antara beberapa hasil penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Meskipun ada beberapa perbedaan pendekatan penelitian, namun beberapa penelitian berikut ini sama-sama meneliti pemberitaan media massa terhadap kebijakan pemerintah. Sebagaimana dapat dilihat dari tabel tinjauan penelitian terdahulu dibawah ini:

Tabel 1: Tinjauan Penelitian Terdahulu

Keterangan	Nama Peneliti	Nama Peneliti	Nama Peneliti	Nama Peneliti
	TESIS Eko Kurniawan 2006	SKRIPSI Firdaus Husin D 2007	TESIS Fazli 2010	SKRIPSI Novi Adriyanti 2015
Judul Penelitian	Analisis Isi Pemberitaan Media Massa tentang Lingkungan Hidup dan Implikasinya terhadap Kebijakan Pengelolaan Lingkungan di Kabupaten Bangka	Minat Menonton Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tapanuli Selatan Terhadap Berita Politik di Metro TV (Studi Korelasi Tayangan Berita Politik dan Minat Menonton Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tapanuli Selatan Terhadap Metro TV)	Pengaruh Persepsi dan Kompetensi Eksekutif dan Legislatif Tentang Bencana Terhadap Perencanaan Anggaran Bencanapada APBD Kota Banda Aceh	Hubungan antara berita Banjir Bandung Selatan di Harian Umum <i>Pikiran Rakyat</i> dengan Kecenderungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Mengubah Kebijakan Penanggulangan Banjir
Teori yang digunakan	Agenda Setting	Agenda Setting	Agenda Setting	Agenda Setting
Metode yang digunakan	Metode analisis isi, wawancara mendalam	Metode korelasional, Uji hipotesis Spearman's Rho	Metode <i>survey explanatory</i>	Metode korelasional, Uji hipotesis Spearman's Rho
Topik penelitian	Aspek komunikasi dan aspek kebijakan memiliki hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi	Bagaimana hubungan antara berita politik dan minat menonton anggota DPRD Tapanuli Selatan periode 2004-2008 terhadap pemenuhan kebutuhan kognitif anggota DPRD Tapanuli Selatan	Pengaruh persepsi (pengalaman, proses belajar, motivasi) dan kompetensi (pengetahuan, keterampilan, sikap) eksekutif dan legislatif tentang bencana terhadap perencanaan anggaran bencana di Kota Banda Aceh.	Bagaimana hubungan antara berita banjir Bandung Selatan di Harian Umum <i>Pikiran Rakyat</i> dengan kecenderungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengubah kebijakan penanggulangan banjir

Hasil penelitian	Implikasi pada aspek kontrol sosial terbukanya ruang untuk kritik, <i>input</i> dan tuntutan kebijakan. Pada aspek kebijakan terlihat adanya perbaikan perencanaan pengelolaan lingkungan di Kab. Bangka dengan meningkatnya partisipasi masyarakat. Pada aspek media semakin terbukanya peran media untuk aktif mengontrol dan menjembatani <i>stakeholders</i> dalam pengelolaan lingkungan.	Hasil ini terbukti bahwa minat menonton Anggota DPRD Tapanuli Selatan terhadap berita politik di Metro TV, yaitu pemenuhan kebutuhan kognitif adalah Ho ditolak, berarti terdapat hubungan antara minat menonton berita politik anggota DPRD Tapanuli Selatan terhadap Metro TV, dengan tingkat pemenuhan kebutuhan anggota DPRD Tapanuli Selatan terhadap MetroTV	Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi (pengalaman, proses belajar, motivasi) dan kompetensi (pengetahuan, keterampilan, sikap) eksekutif dan legislatif tentang bencana secara simultan berpengaruh terhadap perencanaan anggaran bencana. Secara parsial proses belajar dan pengetahuan merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap perencanaan anggaran bencana.	
-------------------------	--	--	--	--

F. Landasan Teoritis

Penelitian ini akan meneliti mengenai hubungan antara berita banjir Bandung Selatan di Harian Umum *Pikiran Rakyat* dengan kecenderungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengubah kebijakan penanggulangan banjir. Pemberitaan banjir Bandung Selatan secara terus menerus di Harian Umum *Pikiran Rakyat*, tidak menutup kemungkinan akan merubah opini para pemangku kebijakan di tanah air sehingga opini tersebut dapat berkembang menjadi sebuah fakta yang perlu ditangani secara serius.

Media dalam cara tertentu akan berinteraksi dengan pikiran publik yang menghasilkan agenda publik. Namun agenda media juga turut hadir berinteraksi dengan agenda kebijakan. Berita banjir Bandung Selatan yang semakin terekspose

oleh media, setidaknya bisa menarik perhatian para pemangku kebijakan tertuju pada pemberitaan tersebut. Sehingga mendorong pemerintah untuk mengubah kebijakan menanggapi banjir.

Berdasarkan hal tersebut, teori yang akan diuji dalam penelitian ini yaitu terori yang diperkenalkan oleh ME Mc.Combs dan Donald L.Shaw dalam *Public Opinion Quarterly* tahun 1972, berjudul *The Agenda Setting Function of Mass Media*, menyatakan bahwa informasi yang idberikan media berita memainkan perannan yang penting dalam mengkontruksi gambaran seseorang tentang realitas.

Edi Santoso dalam buku *Teori Komunikasi*, McCombs & Shaw (1976) menyatakan bahwa:

“audience not only learn about public issues and other matters through the media, they also learn how much importance to attach to an issues or topic from the emphasis the mass media place upon it.” Khayak tidak hanya mempelajari isu publik dan berbagai hal lainyayag diberitakan di media namun juga mempelajari seberapa penting sebuah isu atau topik berdasarkan penekanan yag diberitakan media terhadap topik-topik tersebut. (Santoso, Edi; Setiansah Mite, 2010:89)

Seperti yang dirumuskan Backer yang ditulis oleh Jalaludin Rakhmat dalam buku *“Metode Penelitian Sosial”* mengatakan:

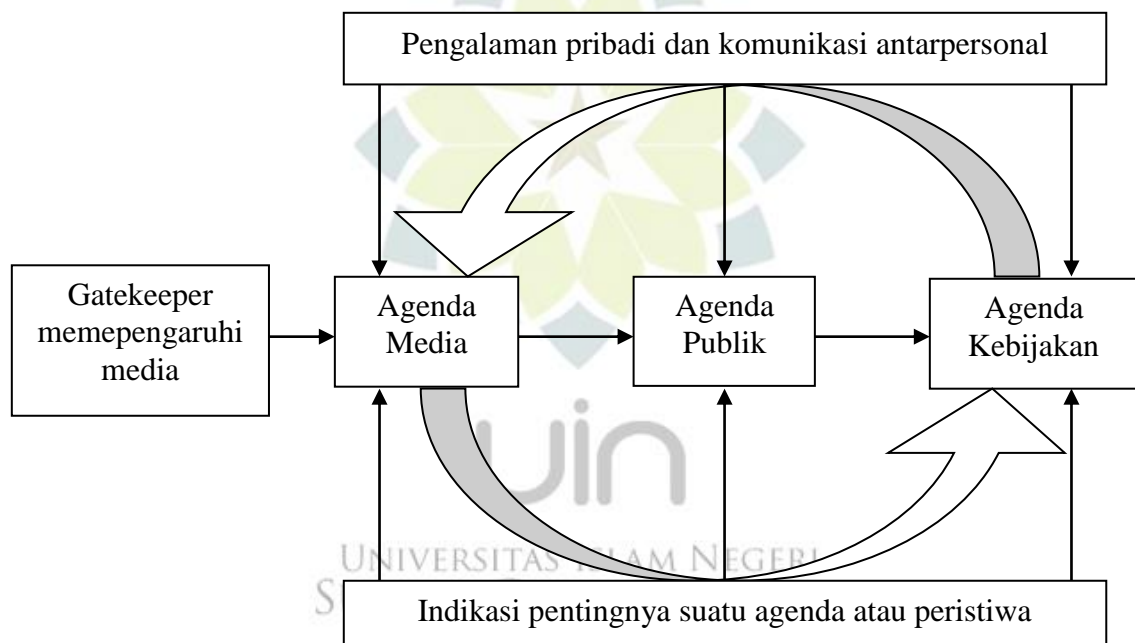
“Agenda Setting merupakan salah satu model teori komunikasi yang merupakan pengembangan dari Jarum Hipodermi, asumsi dasar model ini membentuk persepsi khalayak tentang apa yang dianggap penting. Karena model ini mengasumsikan adanya hubungan positif antara penilaian yang diberikan oleh media pada suatu persoalan. Singkatnya apa yang dianggap penting olah media, akan dianggap penting juga bagi masyarakat.” (Rakhmat, 2002: 68-69)

Setelah melewati lebih dari satu dekade, tahun 1987, Rogers & Dearing memberikan sebuah pernyataan yang menjelaskan proses penyusunan agenda yang berbeda-beda itu dan memberikan kesimpulan yang lebih definitive tentang

jumlah dan bentuk efek yang mungkin muncul. Menurut Everet Rogers dan James Dearing (1987) dalam buku Teori Komunikasi membedakannya menjadi tiga bentuk agenda:

1. Agenda media, yang merujuk pada prioritas perhatian dalam isi media terhadap isu dan peristiwa;
2. Agenda publik, merujuk pada berbagai penonjolan isi dalam opini publik dan pengetahuan.
3. Agenda kebijakan, menjelaskan isu dan proposal kebijakan dari para politisi. (Santoso, Edi; Setiansah Mite, 2010:90)

Gambar 1: Model Agenda Setting (Sumber: Tamburaka, 2013:68)



Menurut Stephen W. Littlejohn dalam buku Agenda Setting Media Massa, mengatakan agenda setting beroperasi dalam tiga bagian sebagai berikut:

- 1) Agenda media

Agenda media itu sendiri harus diformat. Bagaimana media mengeksploitasi atau mengarahkan berita dan informasi secara terus menerus kepada massa. Proses ini akan memunculkan masalah bagaimana agenda media ini terjadi pada waktu pertama kali dengan dimensi yang berkaitan antara lain:

 - a. *Visibility* (visibilitas), yakni jumlah dan tingkat menonjolnya berita.
 - b. *Audience salience* (tingkat menonjol berita bagi khalayak), yakni relevansi isi berita dengan kebutuhan khalayak.

- c. *Valance* (valensi), yakni menyenangkan atau tidak menyenangkan cara pemberitaan bagi suatu peristiwa.

2) Agenda publik

Agenda media dalam banyak hal memengaruhi atau berinteraksi dengan agenda publik atau kepentingan isu tertentu bagi publik. Berpusat pada informasi dan berita yang terus menerus diterima oleh publik, sehingga menimbulkan kesadaran tersendiri kepada publik. Dimensi yang berkaitan antara lain:

- a. *Familiarity* (keakraban), yakni derajat kesadaran khalayak akan topik.
- b. *Personal salience* (penonjolan pribadi), yakni relevansi kepentingan dengan ciri pribadi.
- c. *Favorability* (kesenangan), yakni pertimbangan senang atau tidak senang akan topik berita.

3) Agenda Kebijakan.

Bagaimana akhirnya berita dan informasi tersebut mempengaruhi kebijakan publik atau kebijakan pemerintah. Agenda media dan publik memengaruhi atau berinteraksi ke dalam agenda kebijakan. Agenda kebijakan adalah pemuatan kebijakan publik yang dianggap penting bagi individu. Dimensi yang berkaitan antara lain:

- a. *Support* (dukungan), kegiatan menyenangkan bagi posisi suatu berita.
- b. *Likelihood of action* (kemungkinan kegiatan), kemungkinan pemerintah melaksanakan apa yang diibaratkan.
- c. *Freedom of action* (kebebasan bertindak), nilai kegiatan yang mungkin dilakukan oleh pemerintah. (Tamburaka, 2013:68)

Lebih lanjut lagi, Littlejohn & Foss menyatakan bahwa agenda setting terjadi karena sebuah media harus sangat selektif dalam memberitakan informasi atau menyampaikan berita. Agenda setting meliputi 3 tahap proses, yakni:

1. Prioritas isu yang akan diangkat pada media (pembentukan agenda media).
2. Dalam beberapa hal, agenda media berinteraksi dengan apa yang dipikirkan publik (pembentukan agenda publik).
3. Agenda media dan agenda publik mempengaruhi ataupun berinteraksi dengan apa yang dipikirkan oleh pembuat kebijakan (pembentukan agenda kebijakan). (Sendjaja, 2004:99)

Fokus penelitian ini akan menguji hubungan pemberitaan di media (surat kabar) terhadap suatu kebijakan pemerintah. Variabel X yaitu berita banjir di Bandung Selatan bagian dari agenda media. Variabel Y, kecenderungan Pemerintah Provinsi Mengubah Kebijakan Penanggulangan Banjir bagian dari

agenda kebijakan. Berita yang menjadi agenda tersebut mempengaruhi kebijakan publik atau kebijakan pemerintah. Menurut Yue Tan agenda media dengan agenda kebijakan mempunyai korelasi walaupun tidak tinggi.

“Thus it is important to ask whether the media agenda can influence the policy agenda or will actually be influenced by the policy agenda in the long run. This long-term relationship can show a more general and comprehensive picture of the media’s effect on policy-making, even though it cannot indicate the highest correlation between them.” Oleh karena itu penting untuk menanyakan apakah agenda media dapat mempengaruhi agenda kebijakan atau akan benar-benar dipengaruhi oleh agenda kebijakan dalam jangka panjang. Hubungan jangka panjang ini dapat menunjukkan gambaran yang lebih umum dan komprehensif efek media terhadap pembuatan kebijakan, meskipun tidak dapat menunjukkan korelasi tertinggi diantara mereka. (Tan, 2008:4)

McCombs & Shaw (1972) dalam buku *Agenda Setting Effects Among Newspaper Coverage, Public Opinion and Legislative Policies* mengatakan:

“Agenda setting describes the process by which the mass media select and concentrate on certain issues, leading people to perceive those issues as more salient or important than other.” (Agenda setting proses dimana media massa memilih dan berkonsentrasi pada isu-isu tertentu, orang-orang memahami isu-isu yang lebih menonjol atau penting daripada yang lain). (Tan, 2008:2)

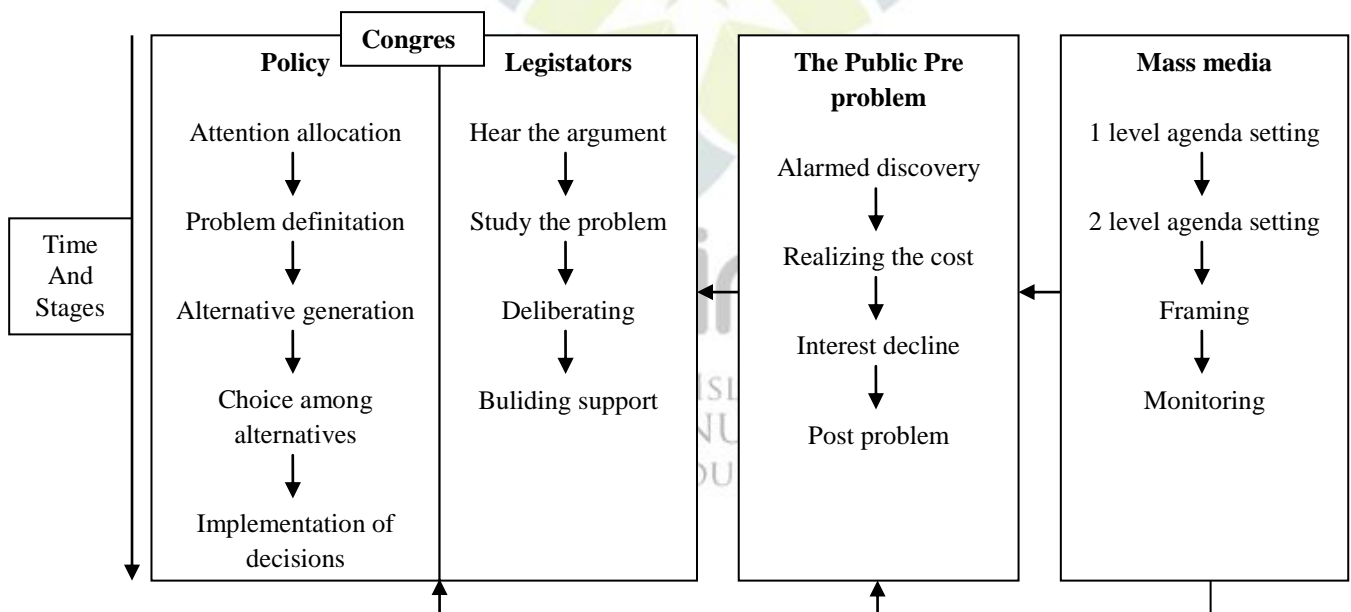
Berbagai isu yang muncul atau mengemuka, ada isu yang diberitakan dengan porsi yang besar, menonjol dibandingkan dengan isu yang diberitakan dengan porsi yang kecil. Perbedaan perhatian (atensi) media terhadap isu ini akan berpengaruh terhadap kognisi (pengetahuan dan citra) suatu peristiwa dimata khalayak. Liputan berita banjir di Bandung Selatan yang diulang-ulang untuk mengangkat pentingnya sebuah isu dalam benak publik merupakan kemampuan media (Harian Umum *Pikiran Rakyat*) yang berfungsi sebagai penentu agenda.

Oleh karena itu, penelitian ini mengikuti definisi asli dari Maxwell McCombs dan Donald Shaw.

Salience, In opinion polls, agenda selling scholars ask, "What is the most important problem facing today?" To measure media agenda and policy agenda, they ask, "How important is an issue on the media agenda and on the policy agenda?" "That is, how does the issue compare with other issues in the amount of news coverage (or policy makers' attention) it receives?" Arti-penting, dalam jajak pendapat, agenda menawarkan pertanyaan, "Apa masalah yang paling penting dihadapi saat ini?" Untuk mengukur agenda media dan agenda kebijakan, mereka bertanya, "Seberapa penting masalah pada agenda media dan agenda kebijakan?" "Artinya, bagaimana masalah dibandingkan dengan isu-isu lain dalam jumlah berita (perhatian atau pembuat kebijakan) cakupan yang diterimanya?" (Tan, 2008:14).

Menurut Yue Tan, proses penetapan agenda merupakan salah satu tahap dari siklus kebijakan. Model ini biasanya membagi proses pembuatan kebijakan menjadi beberapa tahap yaitu media, publik dan pelaksanaan keputusan.

Gambar 2: Model siklus pembuatan kebijakan (Sumber: Tan, 2008:17-18)



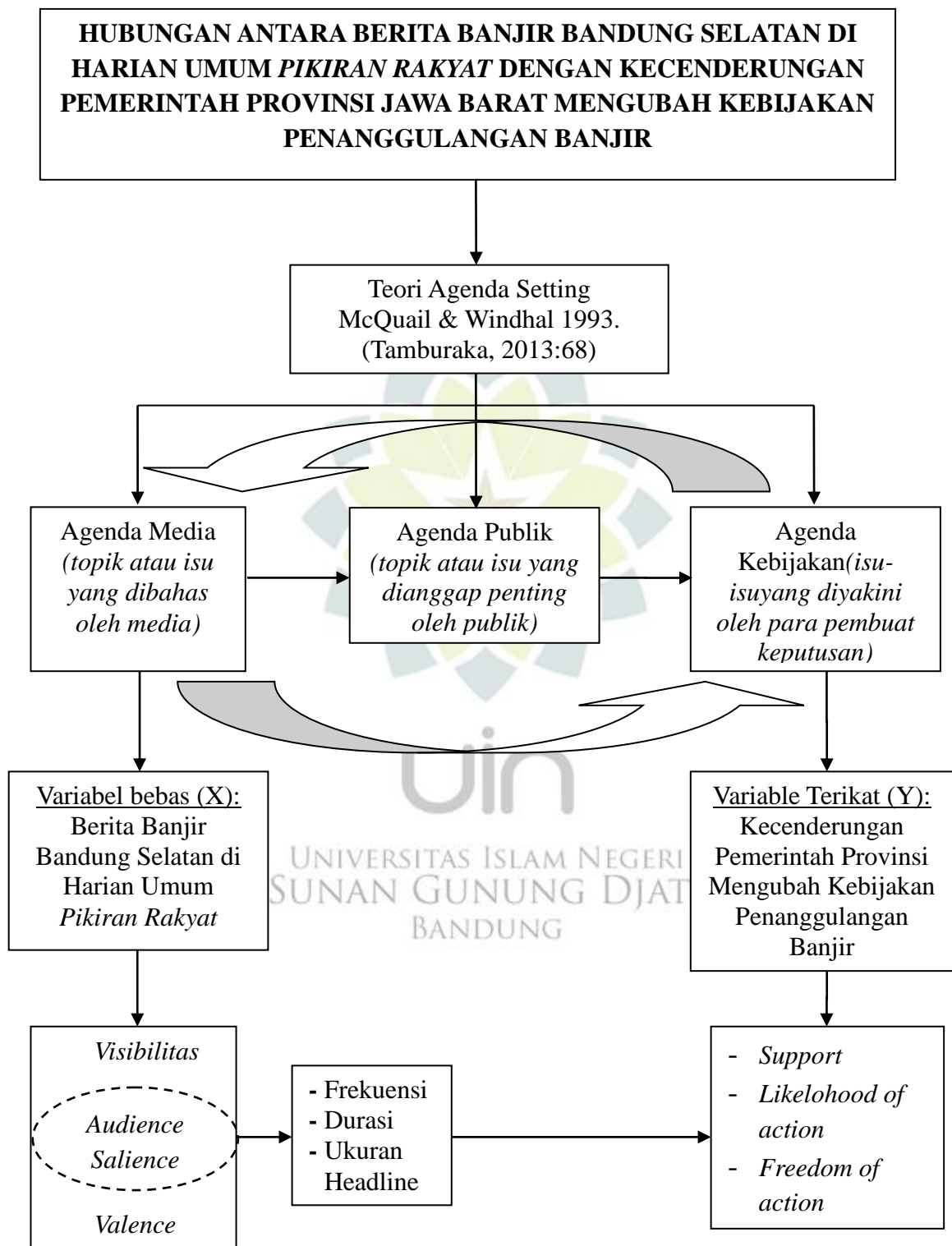
Berdasarkan siklus pembuatan kebijakan yang disesuaikan dengan agenda kebijakan, maka penelitian ini mengambil *congres* sebagai acuan untuk Variabel Y yaitu kecenderungan Pemerintah Provinsi mengubah kebijakan. Sehingga didapatkan indikator Y1 *support* (dukungan) diantaranya *hear the argument* (mendengar argumen), *study the problem* (mempelajari masalah), *deliberating*

(berunding), *building support* (membangun dukungan). Y2 *likelihood of action* (kemungkinan kegiatan) diantaranya *attention allocation* (alokasi perhatian), *problem definition* (batasan masalah), *alternative generation* (generasi alternatif), *choice among alternatives* (pilihan di antara alternatif), dan Y3 *freedom of action* yaitu *implementation of decisions* (pelaksanaan keputusan).

Jones and Baurngartner (2005) yang dikemukakan Yue Tan menetapkan empat tahap diantaranya:

“Specify four stages: agenda setting (attention allocation), problem definition, proposal is and debates (alternative generation), and policy choice. Here. it is noteworthy to emphasize that first-level agenda selling primarily deals with attention allocation, while second-level agenda setting and framing theory mainly concern problem definition and the generation of alternative policy solutions, This dissertation mostly focuses on first-level agenda setting (attention allocation). Jones dan Baurngartner menetapkan empat tahap, pengaturan agenda (alokasi perhatian), batasan masalah, usulan dan perdebatan (alternatif generasi), dan pilihan kebijakan. Disini perlu dicatat untuk menekankan bahwa agenda pertama tingkat penjualan terutama berkaitan dengan alokasi perhatian, sementara agenda kedua tingkat pengaturan dan membingkai teori terutama masalah keprihatinan definisi dan generasi kebijakan alternatif solusi, disertasi ini sebagian besar berfokus pada pengaturan agenda tingkat pertama (alokasi perhatian). (Tan, 2008:19)

Gambar 3: Bagan Kerangka Pemikiran



Tabel 2: Kerangka Operasional Variabel

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Pengukuran
X: Berita Banjir Bandung Selatan di Harian Umum Pikiran Rakyat	X1: <i>Visibilitas</i>	Waktu/ Jumlah pemberitaan	Skala Ordinal
		Ruang pemberitaan	
		Halaman/ panjang pemberitaan	
	X2: <i>Audience Salience</i>	Frekuensi mengakses	
		Durasi mengakses	
		Ukuran Headline	
	X3: <i>Valence</i>	Cara penyajian isi berita	
Y: Kecenderungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Mengubah Kebijakan Penanggulangan Banjir	Y1 : <i>Support</i>	<i>Hear the argument</i> (mendengar argumen)	
		<i>Study the problem</i> (mempelajari masalah)	
		<i>Deliberating</i> (berunding)	
		<i>Building support</i> (membangun dukungan)	
	Y2 : <i>Likelihood of action</i>	<i>Attention allocation</i> (alokasi perhatian)	
		<i>Problem definition</i> (batasan masalah)	
		<i>Alternative generation</i> (generasi alternatif)	
		<i>Choice among alternatives</i> (pilihan diantara alternatif)	
	Y3 : <i>Freedom of action</i>	<i>Implementation of decisions</i> (pelaksanaan keputusan)	

Operasionalisasi konsep diatas pada selanjutnya akan diadaptasi menjadi instrumen pertanyaan dalam kuesioner. Gambaran penelitian mengenai prosedur yang diperlukan untuk memasukkan unit-unit analisis ke dalam kategori-kategori tertentu dari tiap-tiap variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Variabel X (Berita Banjir Bandung Selatan di Harian Umum *Pikiran Rakyat*).

Sebelumnya, variabel media massa dianalisis melalui pengamatan dengan membandingkan pemberitaan banjir di media massa.

- a) *Visibility* (visibilitas), yakni jumlah dan tingkat menonjolnya berita.
- Waktu, jumlah pemberitaan banjir Bandung Selatan di Harian Umum *Pikiran Rakyat* terhitung dari 20 Desember 2014 – 15 Februari 2015.
 - Ruang, penempatan berita banjir Bandung Selatan di Harian Umum *Pikiran Rakyat* terhitung dari 20 Desember 2014 – 15 Februari 2015.
 - Halaman, panjang halaman berita banjir Bandung Selatan di Harian Umum *Pikiran Rakyat* dari 20 Desember 2014 – 15 Februari 2015.
- b) *Audience salience* (tingkat menonjol berita bagi khalayak).
- Frekuensi mengakses, mengumpulkan data pembaca tentang keajegan khalayak membaca berita banjir di Bandung Selatan. Data yang dikumpulkan adalah berapa kali membaca berita banjir Bandung Selatan selama sehari/ seminggu/ dalam sebulan.
 - Durasi mengakses, menghitung berapa lama pembaca Harian Umum *Pikiran Rakyat* membaca berita banjir di Bandung Selatan. Berapa jam sehari, berapa lama pembaca mengikuti berita banjir Bandung Selatan.
 - Ukuran *headline*, kepentingan *headline* berita banjir Bandung Selatan menjadi di Harian Umum *Pikiran Rakyat* untuk pembaca.
- c) *Valance* (valensi), yakni menyenangkan atau tidak menyenangkan cara pemberitaan bagi suatu peristiwa.
- Cara penyajian berita, mengenai teknik penulisan, pemilihan tema pemberitaan banjir Bandung Selatan di Harian Umum *Pikiran Rakyat*.
2. Variabel Y (Kecenderungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Mengubah Kebijakan Penanggulangan Banjir) dengan indikator yang akan diteliti:

- a) *Support* (dukungan), kegiatan menyenangkan bagi posisi suatu berita.
- *Hear the argument* (mendengar argumen), mengumpulkan data dari pembuat kebijakan mengenai kritikan/ masukan/ pendapat terkait isu atau peristiwa banjir itu berasal dari siapa sajadan bagaimana responnya.
 - *Study the problem* (mempelajari masalah), mengumpulkan data dari pembuat kebijakan mengenai sumber rujukan yang mereka pelajari dalam menangani banjir Bandung Selatan.
 - *Deliberating* (berunding), melakukan perundingan dalam memecahkan masalah banjir Bandung Selatan dengan siapa dan bagaimana.
 - *Building support* (membangun dukungan), mengumpulkan data dari pembuat kebijakan mengenai bentuk dukungan yang diberikan.
- b) *Likelihood of action* (kemungkinan kegiatan), kemungkinan pemerintah melaksanakan apa yang diibaratkan.
- *Attention allocation* (alokasi perhatian), mengumpulkan data dari pembuat kebijakan mengenai alokasi perhatian yang diberikan dalam menangani banjir Bandung Selatan.
 - *Problem definition* (batasan masalah), yaitu hal-hal masalah yang memperoleh penelitian dan perumusan secara aktif dan serius dari para pembuat keputusan.
 - *Alternative generation* (generasi alternatif), alternatif-alternatif yang ada perlu dinilai berdasarkan kriteria tertentu.
 - *Choice among alternatives* (pilihan diantara alternatif), gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektivitas dan fisibilitas tiap alternatif dalam

pencapaian tujuan, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai alternatif mana yang paling layak, efektif dan efisien.

c) *Freedom of action* (kebebasan bertindak), nilai kegiatan yang mungkin dilakukan oleh pemerintah.

- *Implementation of decisions* (pelaksanaan keputusan), proses penyesuaian dan penerimaan secara bersama terhadap prinsip-prinsip yang diakui dan diterima. Peraturan yang sudah disepakati secara bersama (legitimasi).

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Hipotesis yang akan diuji ini dinamakan hipotesis kerja. Hipotesis kerja disusun berdasarkan teori (Sugiyono, 2009:64).

Berdasarkan rumusan masalah, maka hipotesis penelitiannya terdapat hubungan antara berita banjir Bandung Selatan di Harian Umum *Pikiran Rakyat* dengan kecenderungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengubah kebijakan penanggulangan banjir. Hipotesis kerja dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan antara (*visibility*) berita banjir Bandung Selatan di Harian Umum *Pikiran Rakyat* dengan kecenderungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengubah kebijakan penanggulangan banjir.
2. Terdapat hubungan antara (*audience salience*) berita banjir Bandung Selatan di Harian Umum *Pikiran Rakyat* dengan kecenderungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengubah kebijakan penanggulangan banjir.

3. Terdapat hubungan antara (*valense*) berita banjir Bandung Selatan di Harian Umum *Pikiran Rakyat* dengan kecenderungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengubah kebijakan penanggulangan banjir.
4. Terdapat hubungan antara berita banjir Bandung Selatan di Harian Umum *Pikiran Rakyat* dengan dukungan (*support*) Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengubah kebijakan penanggulangan banjir.
5. Terdapat hubungan antara berita banjir Bandung Selatan di Harian Umum *Pikiran Rakyat* dengan kemungkinan kegiatan (*likelihood of action*) Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengubah kebijakan penanggulangan banjir.
6. Terdapat hubungan antara berita banjir Bandung Selatan di Harian Umum *Pikiran Rakyat* dengan kebebasan bertindak (*freedom of action*) Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengubah kebijakan penanggulangan banjir.
7. Tidak terdapat hubungan antara (*visibility*) berita banjir Bandung Selatan di Harian Umum *Pikiran Rakyat* dengan kecenderungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengubah kebijakan penanggulangan banjir.
8. Tidak terdapat hubungan antara (*audience salience*) berita banjir Bandung Selatan di Harian Umum *Pikiran Rakyat* dengan kecenderungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengubah kebijakan penanggulangan banjir.
9. Tidak terdapat hubungan antara (*valense*) berita banjir Bandung Selatan di Harian Umum *Pikiran Rakyat* dengan kecenderungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengubah kebijakan penanggulangan banjir.

10. Tidak terdapat hubungan antara berita banjir Bandung Selatan di Harian Umum *Pikiran Rakyat* dengan dukungan (*support*) Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengubah kebijakan penanggulangan banjir.
11. Tidak terdapat hubungan antara berita banjir Bandung Selatan di Harian Umum *Pikiran Rakyat* dengan kemungkinan kegiatan (*likelihood of action*) Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengubah kebijakan penanggulangan banjir.
12. Tidak terdapat hubungan antara berita banjir Bandung Selatan di Harian Umum *Pikiran Rakyat* dengan kebebasan bertindak (*freedom of action*) Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengubah kebijakan penanggulangan banjir.

H. Langkah-langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Adapun alasan memilih lokasi tersebut karena (1) Pemerintah Provinsi Jawa Barat, merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai tanggung jawab, kewenangan, kebijakan dalam menanggulangi banjir di daerahnya seperti Dayeuhkolot, Bojongsoang, Baleendah, Kamasan, Rancaekek. (2) Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan diberikan mandat oleh Presiden Indonesia melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi untuk menyelesaikan masalah banjir secara bertahap (3) Eksekutif: Ketua DPRD Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari juga mendukung upaya yang dilakukan Pemprov menyusun peta jalan penanganan banjir di Bandung Selatan. Penanganan banjir Bandung Selatan itu harus dievaluasi sebab terulang terus, padahal

3. Paradigma dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan paradigma positivisme dan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2009:13).

4. Metode

Penelitian ini menggunakan metode korelasional asosiatif. Pendekatan korelasional adalah suatu pendekatan umum untuk penelitian yang berfokus pada penaksiran kovariasi antara variabel yang muncul secara alami. Metode korelasional asosiatif bermaksud untuk menjelaskan hubungan (korelasi) antar variabel, apabila ada seberapa erat hubungannya dan berarti atau tidak adanya hubungan antara variabel tersebut (Kriyantono, 2006:60).

Penelitian ini berusaha menjelaskan permasalahan khusus antar dua variabel, untuk melihat adakah hubungan berita banjir Bandung Selatan di Harian Umum *Pikiran Rakyat* dengan kecenderungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengubah kebijakan dalam menanggulangi banjir.

5. Jenis dan Sumber Data

Berangkat dari konsep-konsep atau teori yang melandasinya, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Dibuktikan dengan data berupa angka dan analisis berdasarkan analisis statistik. Metode yang digunakan yaitu survai dengan membagikan kuiseioner sehingga data hasil observasi atau pengukuran dalam penelitian ini dinyatakan dalam angka. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Sumber Data Primer

Pengumpulan data primer penelitian ini melalui cara menyebarkan kuesioner dan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yaitu BPBD Provinsi Jawa Barat dan DPRD Provinsi Jawa Barat yang meliputi Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat dan Badan Legilasi DPRD Provinsi Jawa Barat.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data tambahan atau suplemen dari data primer. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku tentang komunikasi massa, kebijakan pemerintah, dan hasil penelitian terdahulu mengenai pemberitaan di surat kabar (Harian Umum *Pikiran Rakyat*).

6. Populasi dan Sampel

Menurut Kriyantono (2006:153), keseluruhan objek atau fenomena yang akan diriset disebut populasi. Sedangkan sampel adalah bagian tertentu yang dipilih dari populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah lembaga eksekutif dan

legislatif yang bekerja pada wilayah Provinsi Jawa Barat serta terlibat dalam perencanaan pembuatan kebijakan penanggulangan bencana banjir.

Sesuai UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang mempunyai wewenang dalam perencanaan pembuatan kebijakan penanggulangan bencana yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah dan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dan DPR-RI ataupun DPR-D.

Penelitian ini memfokuskan pada pemerintahan provinsi Jawa Barat, sehingga respondennya yaitu BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Provinsi Jawa Barat dan DPRD Provinsi Jawa Barat yang meliputi Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat dan Badan Legilasi DPRD Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan keterangan diatas didapat jumlah populasi penelitian sebanyak 45 orang. Mengingat jumlah populasi yang relatif sedikit, sehingga dalam penelitian ini semua anggota populasi dijadikan sampel disebut *sampling jenuh* (Sugiyono: 2009:85).

Tabel 4: Jumlah Sampel Eksekutif dan Legislatif di Provinsi Jawa Barat

No	Populasi	Jumlah Populasi
1	Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat periode 2014-2019	20 orang
2	Badan Legilasi DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2014-2019	7 orang
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat	18 orang
Jumlah		45 orang

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
- b) Wawancara (*Interview*), merupakan suatu metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah repondennya sedikit.
- c) Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara pencarian dan pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung.
- d) Sedangkan studi pustaka merupakan pencarian data dengan menggunakan sumber-sumber tertulis seperti buku atau penelitian-penelitian sebelumnya.

I. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 2009:147). Data yang diperoleh dari hasil penelitian dan dianalisis dalam tiga tahap analisa yaitu:

1. Analisis Tabel Tunggal

Suatu analisa yang dilakukan dengan membagi-bagikan variabel penelitian ke dalam kategori yang dilakukan atas dasar frekuensi. Analisis ini merupakan langkah awal dalam menganalisa data yang terdiri dari dua kolom yaitu sejumlah

frekuensi dan persentase untuk setiap kategori (Singarimbun, 1995: 266).

Pengolahan data melalui statistika deskriptif. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam proses pengolahan data adalah sebagai berikut:

- a) Memeriksa seluruh angket yang telah dijawab oleh responden.
- b) Menentukan jumlah skor maksimum dengan menggunakan rumus:

$$X_{max} = \text{jumlah item} \times \text{skor terbesar}$$

- c) Menentukan jumlah skor minimum dengan menggunakan rumus:

$$X_{min} = \text{jumlah item} \times \text{skor terkecil}$$

- d) Mengukur jenjang, dengan cara: $\text{Jenjang} = X_{max} - X_{min}$

- e) Menghitung panjang interval kelas, dengan cara:

$$\text{Panjang interval kelas} = \text{jenjang} : \text{banyak kelas interval}$$

- f) Membuat persentase skor yang diperoleh variabel X maupun variabel Y.

2. Uji Validitas dan Reliabilitas

Setelah validitas konten dari item angket telah terpenuhi, maka dimulailah penyebaran angket dan pengambilan data pada responden. Penyebaran angket ini bertujuan untuk mengetahui nilai validitas dan reliabilitas alat ukur serta memperoleh data yang kemudian akan dianalisis secara statistik.

- a) Validitas Alat Ukur

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat (Arikunto, 1998: 160).

Uji validitas bertujuan untuk menguji sejauh mana item kuesioner yang valid dan mana yang tidak. Hal ini dilakukan dengan mencari korelasi setiap item pertanyaan dengan skor total pernyataan untuk hasil jawaban responden yang mempunyai skala pengukuran ordinal minimal serta pilihan jawaban lebih dari dua pilihan, perhitungan korelasi antara pernyataan ke satu dengan skor total digunakan alat uji korelasi *Product Moment Corelation* dengan rumus:

$$r_{xy} = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan:

r	= Koefisien validitas item yang dicari
X	= Skor yang diperoleh subjek dari seluruh item
Y	= Skor total
$\sum X$	= Jumlah skor dalam distribusi X
$\sum Y$	= Jumlah skor dalam distribusi Y
$\sum X^2$	= Jumlah kuadrat dalam skor distribusi X
$\sum Y^2$	= Jumlah kuadrat dalam skor distribusi Y
n	= Banyaknya responden

Dimana: r = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y, dua variabel yang dikorelasikan (Arikunto, 1998: 256). Secara teknis, pengujian dilakukan dengan menggunakan *software* SPSS versi 21. Adapun langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut:

- 1) Menyajikan alat ukur kepada sejumlah responden.
- 2) Mentabulasikan data.
- 3) Mencatat skor-skor setiap item yang akan diuji.
- 4) Menguji validitas item tersebut dengan menggunakan SPSS.
- 5) Menyeleksi item yang signifikan atau valid, dan membuang item yang tidak valid.

b) Reliabilitas Alat Ukur

Selain valid, syarat yang mesti dipenuhi oleh sebuah instrumen adalah reliabel, artinya bila instrumen diujikan pada kelompok yang sama walaupun pada waktu yang berbeda, hasilnya akan sama tidak jauh berbeda. Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauhmana suatu alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan. Untuk mendapat reliabilitas ada beberapa teknik yang dapat dipakai. Salah satu teknik statistik yang digunakan oleh peneliti adalah teknik *Alfa Cronbach*. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$r_{11} = \left[\frac{k}{k-1} \right] - \left[\frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right]$$

Keterangan:

- r_{11} = reliabilitas instrument
- n = banyaknya bulir pertanyaan atau soal
- $\sum \sigma_b^2$ = jumlah varians bulir
- σ_t^2 = varians total (Arikunto, 1998: 193)

Pengujian tingkat reliabilitas instrumen dilakukan dengan menggunakan *software* SPSS 21.0. Adapun langkah kerja yang dilakukan adalah sebagai berikut.

- 1) Menyajikan alat ukur kepada sejumlah responden.
- 2) Mentabulasikan data.
- 3) Mencatat skor-skor setiap item yang akan diuji.
- 4) Menguji reliabilitas dengan menggunakan SPSS.

3. Analisis Tabel Silang

Teknik yang digunakan untuk menganalisa dan mengetahui variabel yang satu memiliki hubungan dengan variabel lainnya, sehingga dapat diketahui apakah variabel tersebut bernilai positif dan negatif (Singarimbun, 1995: 273).

4. Uji Hipotesis

Uji Hipotesis ialah salah satu fungsi statistik untuk menyederhanakan data sehingga mudah dibaca dan dipresentasikan, juga dipakai untuk menguji hipotesis. Data pada variabel X (Berita Banjir Bandung Selatan di Harian Umum *Pikiran Rakyat*) dan variabel Y (Kecenderungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Mengubah Kebijakan Penanggulangan Banjir) adalah data ordinal. Maka teknik korelasi yang digunakan adalah Korelasi Rank Spearman yang akan diolah dengan menggunakan alat bantu software SPSS versi 21. Jika $\rho < 0$, maka hipotesis ditolak. Jika $\rho > 0$, maka hipotesis diterima (Kriyantono, 2006: 143)

$$\rho = 1 - \frac{6 \cdot \sum d^2}{n^3 - n}$$

Keterangan: ρ = Koefisien Korelasi Rank Spearman
 b = Beda antara 2 rank
 n = Banyaknya rank

Selanjutnya untuk melihat derajat hubungan diantara dua variabel digunakan nilai koefisien korelasi sebagai berikut (Kriyantono, 2006: 171):

- $< 0,20$ = hubungan rendah sekali ; lemah sekali
- $0,20-0,39$ = hubungan rendah tapi pasti
- $0,40-0,70$ = hubungan yang cukup berarti
- $0,71-0,90$ = hubungan yang tinggi; kuat
- $> 0,90$ = hubungan yang sangat tinggi; kuat sekali; dapat diandalkan.

Berdasarkan nilai ρ , untuk mengetahui besarnya pengaruh pemberitaan banjir di Bandung Selatan dengan kebijakan penanggulangan bencana dilakukan uji determinasi dengan rumus (Rakhmat, 2004 : 30) :

$$Kp = (\rho)^2 \times 100\%$$

Keterangan : Kp = Kekuatan prediksi

ρ = Koefisien Korelasi Rank Spearman